



POLUSI DAN ILUSI

Bagaimana Pembiayaan “Berkelanjutan” dari
Bank Pembangunan Asia Mendorong Ekspansi
Batubara di Indonesia

Penulis: Dustin Roasa

Peninjau: David Pred, Sarah Jaffe, Mignon Lamia, Rafaela Menezes de Magalhães, Daniel Willis, Novita Pratiwi, Tanya Lee Roberts-Davis, Will O'Sullivan, dan Petra Kjell

Diterbitkan oleh Inclusive Development International, Recourse, Trend Asia, dan NGO Forum on ADB.

April 2024

Untuk informasi lebih lanjut tentang isu yang diangkat dalam laporan ini, hubungi:

Inclusive Development International

9 SW Pack Square Suite 301
Asheville, NC 28801 USA

Tel. +1 (828) 505-4340

info@inclusivedevelopment.net

Inclusive Development International berupaya memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan cara mendukung masyarakat di seluruh dunia untuk mempertahankan HAM dan lingkungan mereka di hadapan kegiatan korporasi yang merugikan. Pelajari lebih lanjut di:

www.inclusivedevelopment.net

©2024 Inclusive Development International. Seluruh hak dilindungi undang-undang. Seluruh konten di sini tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi Hak Cipta Inclusive Development International, yang dapat dilihat di:

www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2022/06/IDI-CALCopyrightLicense.pdf



PLTU Suralaya merupakan kompleks industri terkotor di Asia Tenggara.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank atau ADB) telah berjanji untuk menjadi pelopor dalam upaya pembiayaan iklim. Pada tahun 2021, ADB memberikan pinjaman sebesar 600 juta dolar Amerika kepada Pemerintah Indonesia seolah-olah untuk mendukung energi terbarukan dan meningkatkan akses listrik di daerah perdesaan. Namun sebuah analisis terhadap kontrak pinjaman tersebut menunjukkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru. Ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kebijakan bank.

Pada suatu pagi yang lembap baru-baru ini, Mad Haer Effendi, seorang aktivis kampanye lingkungan hidup Indonesia, berdiri di atas sebuah bukit berumput di pantai barat Pulau Jawa. Ia memandang ke arah Selat Sunda, jalur perairan tersibuk yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatra, dan menyaksikan kabut kelabu yang melayang ke daratan, perlahan-lahan meredupkan sinar matahari. Langit semakin gelap pertanda badai akan datang menjelang, tetapi saat itu sedang musim kemarau. “Itu bukan hujan, itu abu batubara,” kata Mad. “Pembangkit listrik tenaga batubara beroperasi dengan kapasitas yang lebih tinggi pagi ini.”

Di kejauhan, enam cerobong asap menjulang tinggi di atas selat, memuntahkan kepulan-kepuluan asap pembakaran yang melayang di atas deretan rumah yang berada di hutan hujan di sekitarnya.

Cerobong-cerobong asap itu merupakan bagian dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, yang merupakan pembangkit listrik tenaga batubara terbesar¹ di Asia Tenggara. PLTU berkapasitas 4.025 megawatt ini memasok listrik untuk industri berat setempat dan Jakarta, yang jaraknya kurang lebih dua jam dengan berkendara.

Pulau Jawa merupakan pusat industri listrik tenaga batubara di Indonesia, dan Suralaya ditengarai sebagai pembangkit listrik tenaga batubara yang paling terkenal di pulau ini. Berdasarkan analisis independen dari data satelit, PLTU ini merupakan kompleks industri terkotor² di Asia Tenggara. Polusi yang dihasilkan dari PLTU ini dan pembangkit listrik batubara lain di sekitarnya membunuh³ sekitar 2.500 orang Indonesia per tahunnya dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan dan kanker.

1 www.eco-business.com/news/south-korea-faces-public-scrutiny-for-financing-coal-plants-in-indonesia/

2 energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Jakarta-Transboundary-Pollution_FINALEnglish.pdf

3 energyandcleanair.org/publication/transboundary-air-pollution-in-the-jakarta-banten-and-west-java-provinces/



Mad Haer Effendi mengepalai organisasi advokasi lingkungan PENA Masyarakat.

Masalah-masalah tersebut tampaknya akan semakin memburuk. Pada tahun 2021, mulai dilakukan konstruksi untuk ekspansi kompleks pltu baru sebesar 2.000 megawatt atau yang dikenal sebagai Jawa 9 & 10. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace, ekspansi ini akan menyebabkan⁴ 2.400 hingga 7.300 kematian dini selama masa operasinya yang diperkirakan akan berjalan selama 30 tahun.

Yang mengejutkan, ekspansi tersebut telah menerima dukungan dari sumber rahasia yang tak terduga: ADB, pemberi pinjaman yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan, yang telah berjanji⁵ untuk menjadi pelopor dalam memerangi perubahan iklim. Meskipun telah berjanji demikian, Inclusive Development International menemukan bahwa bank tersebut baru-baru ini meminjamkan dana sebesar 600 juta dolar Amerika untuk mendukung rencana penyediaan listrik Pemerintah Indonesia, yang masih mencakup puluhan pembangkit listrik tenaga batubara di negara ini, termasuk PLTU Jawa 9 & 10, serta proyek-proyek bahan bakar fosil lainnya. Namun karena dikemas dalam istilah kelestarian lingkungan, pinjaman tersebut luput dari pengawasan publik hingga saat ini. Inclusive Development International⁶ menemukan pinjaman tersebut dalam investigasinya⁷ mengenai bantuan pendanaan pembangunan untuk batubara di Asia.

Pinjaman yang ditandatangani pada bulan Desember 2021 ini diberikan pada waktu yang krusial bagi ADB yang sedang berusaha beralih dari pembiayaan bahan bakar fosil ke investasi ramah iklim. Pada bulan Mei 2023, dalam rapat umum tahunan ADB, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengumumkan⁸ pembiayaan ramah iklim sebesar 100 miliar dolar Amerika. Dana ini akan digunakan di antaranya untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan dan pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batubara. Asakawa juga menegaskan kembali komitmen bank ini untuk menghentikan pembiayaan proyek-proyek batubara baru. “Perjuangan dunia melawan perubahan iklim akan dimenangkan atau dikalahkan di Asia dan Pasifik,” katanya.

Salah satu pemain kunci dalam perjuangan ini adalah Indonesia, operator listrik tenaga batubara terbesar keenam⁹ di dunia. Walaupun Pemerintah Indonesia berencana untuk memperluas energi terbarukan, di waktu yang bersamaan juga sedang membangun¹⁰ hingga 18,8 gigawatt kapasitas listrik tenaga batubara baru, ketiga¹¹ terbesar setelah Cina dan India, yang sangat mengkhawatirkan para ahli iklim.

Karena mendukung rencana ekspansi batubara Pemerintah Indonesia, ADB terlihat melanggar komitmen tanpa-batu-bara-baru dalam Kebijakan Energi¹² yang diperbaruinya pada bulan Oktober 2021, yang diluncurkan dua bulan sebelum menandatangani pinjaman tersebut. Pinjaman ini juga secara serius merongrong agenda energi terbarukan ADB dan meneruskan pola dukungannya seperti di masa lalu untuk bahan bakar fosil di kawasan ini, termasuk di dalamnya PLTU Suralaya yang didanai ADB pada tahun 1980an¹³ dan 1990an¹⁴, sekaligus pemberian bantuan¹⁵ bagi pengembangnya.

“ADB mengulangi kesalahan yang sama yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun di sini,” ujar Mad yang mengepalai organisasi advokasi lingkungan yang berbasis di Jawa, PENA Masyarakat.

4 www.greenpeace.to/greenpeace/?p=3262

5 www.adb.org/climatebank

6 www.inclusivedevelopment.net/policy-advocacy/end-fossil-finance

7 docs.google.com/spreadsheets/d/1IxxwV5lIio261KkCAxIzG1bQqN6HuleMHQr_44B0deEc/edit#gid=0

8 www.adb.org/news/speeches/opening-statement-56th-adb-annual-meeting-press-conference-masatsugu-asakawa

9 www.statista.com/statistics/530569/installed-capacity-of-coal-power-plants-in-selected-countries/

10 globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2023/03/Boom-Bust-Coal-2023.pdf

11 news.mongabay.com/2023/08/captive-to-coal-indonesia-to-burn-even-more-fossil-fuel-for-green-tech/

12 www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/737086/energy-policy-2021.pdf

13 documents1.worldbank.org/curated/en/381801468269093471/pdf/multi-page.pdf

14 documents1.worldbank.org/curated/en/343731628595913833/pdf/Announcement-of-Indonesia-Suralaya-Thermal-Power-Project-on-July-2-1992.pdf

15 documents1.worldbank.org/curated/ar/593661468254038747/pdf/multi-page.pdf

Pembiayaan “hijau” untuk batubara

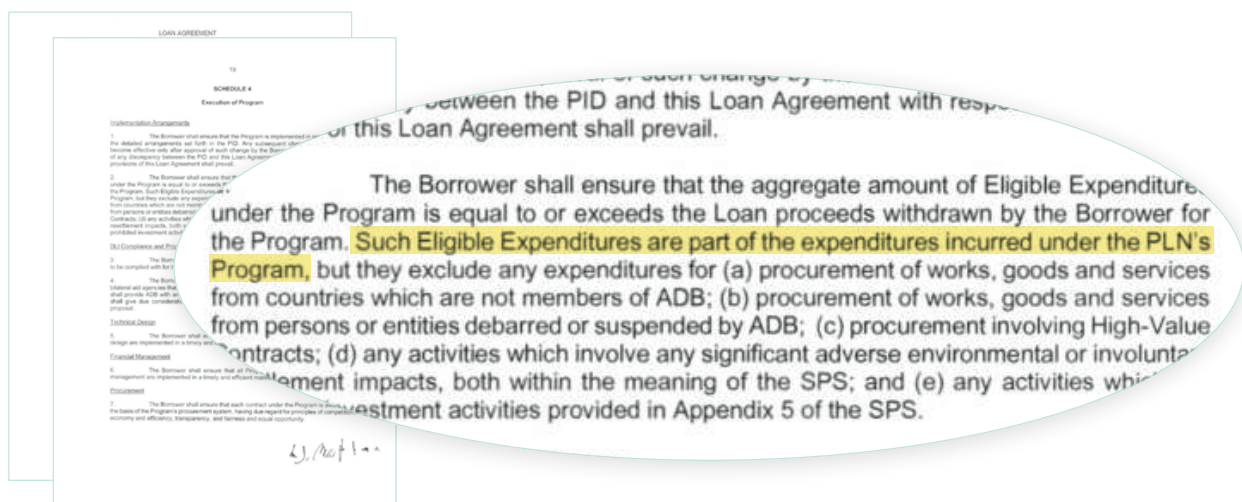
ADB memberikan pinjaman¹⁶ sebesar 600 juta Dolar AS kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik milik negara Indonesia. PLN merupakan pemilik mayoritas dari ekspansi PLTU Jawa 9 & 10 dan akan menjadi pembeli tunggal listriknya. Meskipun ADB mengklaim di situs webnya bahwa pembiayaan ini akan mendukung “akses energi yang berkelanjutan dan dapat diandalkan”, jika dicermati, perjanjian pinjaman¹⁷ ini justru menunjukkan sebaliknya.

Meskipun ADB telah memiliki komitmen tanpa-batu-bara-baru saat kesepakatan tersebut ditandatangani, perjanjian pinjaman tersebut tidak mencakup klausul tanpa-batu-bara. Ini seharusnya merupakan cara paling mudah bagi bank untuk memastikan bahwa PLN tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk rencana ekspansi batubaranya yang cukup besar. Perjanjian tersebut memang mencakup klausul yang mengecualikan alkohol dan perjudian. Pembatasan seperti ini lumrah ada dalam perjanjian pinjaman seperti International Finance Corporation atau IFC, Grup Bank Dunia secara konsisten menyertakan¹⁸ klausul tanpa-batu-bara dalam perjanjian pinjamannya.

Perjanjian pinjaman ini tidak hanya gagal membatasi proyek batubara; perjanjian ini justru memungkinkan PLN untuk mendanai pembangkit listrik tenaga batubara. “Pengeluaran yang memenuhi syarat”, atau segala kegiatan peminjam dana yang diizinkan menggunakan dana pinjaman menurut perjanjian tersebut adalah “pengeluaran yang dilakukan di bawah Program PLN”. Sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian tersebut, Program PLN yang dimaksud adalah RUPTL 2021-2030, yakni rencana bisnis¹⁹ 10 tahun terakhir PLN. Rencana ini mencakup PLTU Jawa 9 & 10 dan lebih dari belasan²⁰ proyek batubara lainnya, selain juga rencana terkait infrastruktur energi lainnya. Segala sesuatu yang disebutkan di atas diperbolehkan menurut perjanjian pinjaman, yang sebagai kontrak hukum utama dalam kesepakatan ini, mengesampingkan semua dokumen lainnya.

Bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut seolah-olah membatasi PLN agar tidak menggunakan dana bank tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan atau pemindahan penduduk secara paksa, yang jika diterapkan secara ketat seharusnya mencakup pembangkit listrik tenaga batubara. Namun, bank tersebut mengalihkan tanggung jawab kepada PLN untuk memastikan dan mengonfirmasi bahwa dampak-dampak tersebut dapat dihindari, ini justru menjadi titik buta yang mengkhawatirkan.

Gambar 1: Lampiran 4, halaman 19 dari perjanjian pinjaman ADB – PLN menggambarkan pengeluaran yang memenuhi syarat dari pinjaman tersebut, atau kegiatan yang diizinkan menggunakan hasil pinjaman tersebut, sebagai “Program PLN”.



16 [www.adb.org/news/600-million-adb-loan-boost-sustainable-and-reliable-electricity-services-western-and-central#:~:text=MANILA%2C%20PHILIPPINES%20\(13%20December%202021,island%20and%20promote%20the%20use](http://www.adb.org/news/600-million-adb-loan-boost-sustainable-and-reliable-electricity-services-western-and-central#:~:text=MANILA%2C%20PHILIPPINES%20(13%20December%202021,island%20and%20promote%20the%20use)

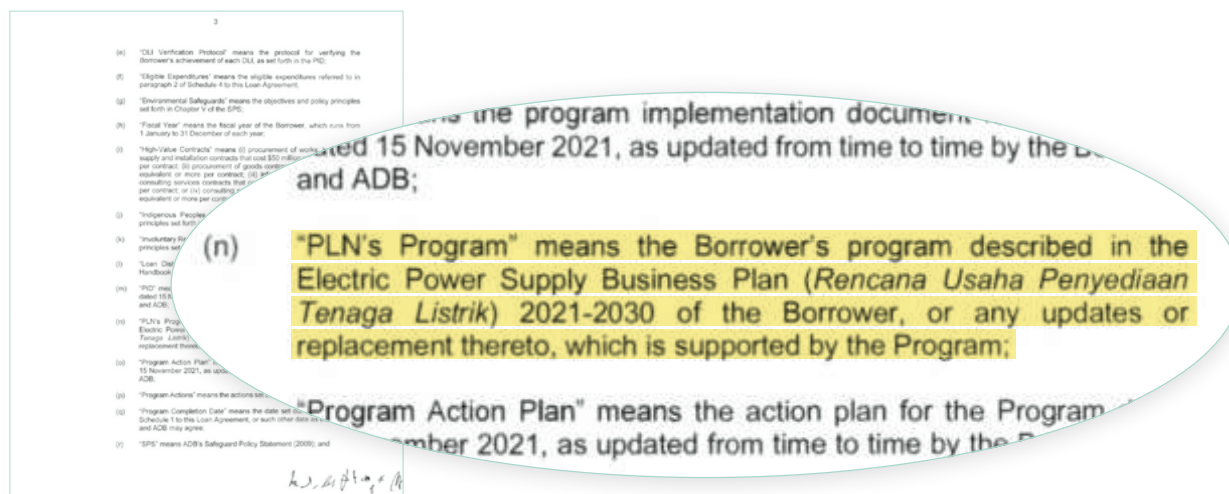
17 www.adb.org/sites/default/files/project-documents/53220/53220-001-lna-en.pdf

18 www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/202309-ifc-guidance-note-on-financial-intermediaries.pdf

19 web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf

20 docs.google.com/spreadsheets/d/1lxwV5lIio261KkcAxIzG1bQqN6HuleMHQr_44B0deEc/edit#gid=0

Gambar 2: Halaman 3 dari perjanjian pinjaman mendefinisikan “Program PLN” sebagai Rencana Bisnis Pasokan Listrik PLN 2021-2030, yang artinya PLN dapat menggunakan hasil pinjaman dari ADB untuk mendanai kegiatan dalam rencana bisnis 10 tahun tersebut.



Gambar 3: Rencana Bisnis Pasokan Listrik PLN 2021-2030 mencakup rencana pengembangan untuk ekspansi PLTU Jawa 9 & 10, di Halaman B-21.

B-21

Tabel B2.9. Subgrupos Brouce Pembangunan Pemangkit

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah
PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,0
PLTU	335,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,0
PLT Lains	-	-	25,0	190,0	180,0	-	-	-	-	25,0	420,0
Jumlah	335,0	-	25,0	190,0	180,0	-	-	-	-	25,0	690,0
SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLTU	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	2.000,0
PLTP	-	-	-	-	30,0	-	-	80,0	-	-	480,0
PLTM	-	-	-	-	26,0	0,0	-	-	-	-	26,0
PLT Lains	-	-	0,0	30,0	170,0	20,0	-	45,0	30,0	-	305,0
Jumlah	-	-	0,0	27,0	33,0	1.220,0	1.020,0	125,0	50,0	40,0	2.534,2
Total	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	2.000,0
PLTU	335,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-	2.335,0
PLTP	-	-	-	-	30,0	-	-	80,0	-	-	480,0
PLTM	-	-	-	-	26,0	0,0	-	-	-	-	26,0
PLT Lains	-	-	-	-	23,0	190,0	370,0	20,0	-	-	583,0
Jumlah	335,0	-	-	-	1.079,0	1.460,0	1.390,0	1.00,0	-	-	4.264,0

Tabel B2.10. Brouce P

No	Nama Stasiun Pemangkit Listrik	Jawa Barat	Jawa Tengah	Lokasi/ Peta
1	Jawa Bdi PLTU	PLTU	Lombok II	
2	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Cikotok	
3	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Cikotok	
4	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Cikotok	
5	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Jawa Bdi PLTM	
6	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Jawa Bdi PLTM	
7	Pakis Pungung	PLTM	Pakis Pungung (Jawa Bdi PLTM)	
8	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
9	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Jawa Bdi PLTM	
10	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Jawa Bdi PLTM	
11	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
12	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
13	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
14	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
15	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
16	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
17	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
18	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
19	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
20	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
21	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
22	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
23	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
24	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
25	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
26	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
27	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
28	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
29	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	
30	Jawa Bdi PLTM	PLTM	Bontor	

Jawa Bali

PLTS

Tersebar

Jawa-Bali (Kuota)
Tersebar

150,0

2025

Jawa Bali

PLTSa

Jawa-Bali (Kuota)
Tersebar

40,0

2025

Renc

15

Jawa Bali

PLTU

Jawa-9

1000,0

2025

Konstruk

16

Jawa Bali

PLTS

Jawa-Bali (Kuota)
Tersebar

20,0

2026

Rencana

17

Jawa Bali

PLTU

Jawa-10

1000,0

2026

ADB menyangkal bahwa pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mendanai pembangkit listrik tenaga batubara. Dalam surel kepada Inclusive Development International, juru bicara ADB menulis, “Program Akses Energi yang Berkelanjutan dan Dapat Diandalkan berupaya meningkatkan akses terhadap energi yang berkelanjutan dan dapat diandalkan bagi masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pengeluaran yang memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman (4164-INO) antara ADB dan PT PLN dibatasi hanya untuk mencapai hasil program yang telah ditetapkan, yaitu (i) rehabilitasi, penguatan, dan perluasan jaringan listrik; (ii) mendorong penggunaan energi bersih; dan (iii) penguatan

kapasitas kelembagaan (lihat Perjanjian Pinjaman, Lampiran 1). Kami hendak menekankan bahwa pengeluaran yang memenuhi syarat yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman tidak mencakup pembangkit listrik tenaga batubara.”

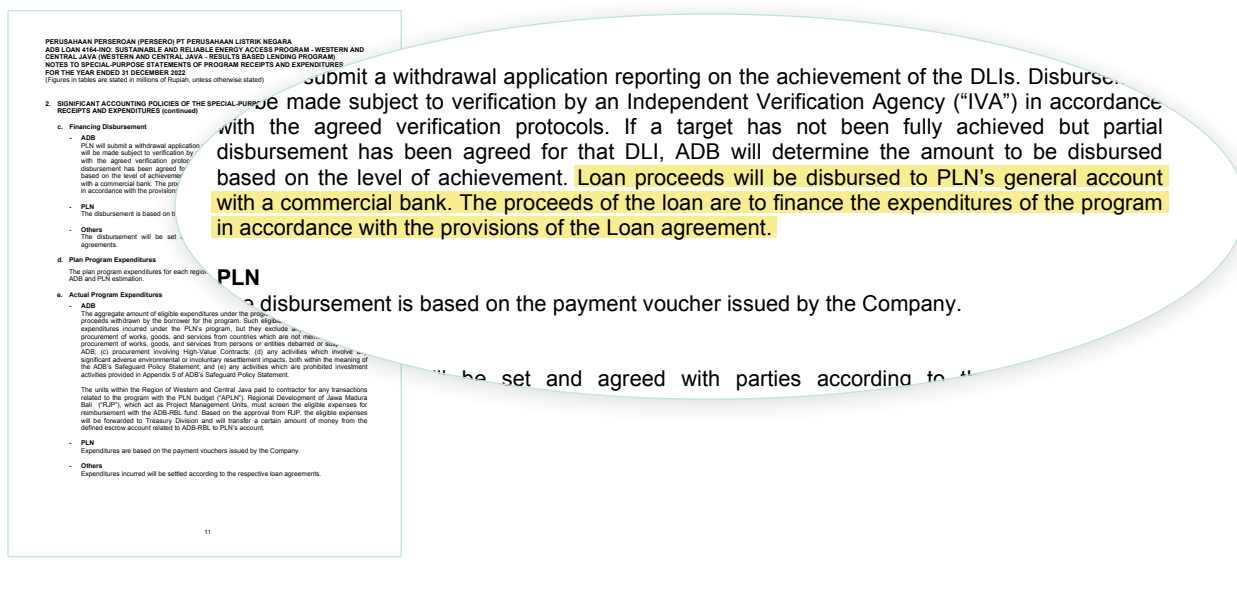
Juru bicara tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan yang jelas antara bagaimana pengeluaran yang memenuhi syarat didefinisikan dalam perjanjian pinjaman dan perbedaan interpretasi bank mengenai pengeluaran ini.

PLN tidak menanggapi pertanyaan rinci terkait pinjaman yang dikirim melalui email dan surat.

Dari sana permasalahan atas pinjaman tersebut berlanjut. Meskipun seandainya ADB sudah secara memadai di atas kertas mengecualikan batubara, pada praktiknya bank ini tidak akan mampu menerapkan pembatasan ini. Berdasarkan²¹ laporan perusahaan, penyebabnya ialah uang pinjaman tersebut disalurkan ke rekening bank umum PLN yang bercampur-aduk

dengan dana-dana lain perusahaan. Akibatnya, penelusuran penggunaan akhir uang tersebut menjadi mustahil dilakukan. Ini merupakan praktik yang tidak sesuai dengan standar pembiayaan hijau ADB, yang mensyaratkan²² dana ditempatkan dalam rekening terpisah sehingga memudahkan dilakukannya penelusuran dan verifikasi.

Gambar 4: Laporan tahunan PLN 2022 tentang pinjaman dari ADB mencakup satu bagian di halaman 11 yang menunjukkan bahwa hasil pinjaman dari ADB disimpan di rekening umum PLN, sehingga uangnya tidak dapat dilacak.



Kurangnya pendekatan²³ PLN dalam mengelola pembiayaan iklim pernah menyebabkan pihaknya dituduh melakukan penyalahgunaan. Pada tahun 2021, Grup Bank Dunia menjamin pembiayaan iklim sebesar 500 juta dolar Amerika dari bank-bank komersial kepada PLN. Pinjaman tersebut seharusnya digunakan untuk mendanai enam proyek energi terbarukan yang diidentifikasi dalam dokumen²⁴ kesepakatan tersebut. Namun demikian, PLN telah membayar penuh proyek-proyek tersebut, sehingga PLN dapat dengan bebas menggunakan dana tersebut di tempat lain. Pinjaman ini merupakan "suntikan modal kerja murah" yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan "bersih dan kotor", berdasarkan sebuah analisis²⁵ dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis. "[Pinjaman

tersebut] hanyalah untuk menutup lubang kas," tulis seorang analis dari lembaga pemikir energi yang disegani tersebut.

Dengan miliaran Dolar pembiayaan iklim yang akan masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, ADB dan donor lainnya setidaknya harus mencantumkan bahwa batubara tidak akan diikutsertakan di dalam perjanjian pembiayaan dan mewajibkan dana yang masuk untuk disimpan di dalam rekening terpisah yang penggunaannya dapat ditelusuri dan diverifikasi. Jika tidak, para donor berisiko membuka diri terhadap bahan bakar fosil. "Investasi seperti ini seharusnya membantu masyarakat Indonesia dengan cara mendanai energi terbarukan, bukan malah merusak lingkungan," ujar Mad yang merupakan aktivis lingkungan.

21 web.pln.co.id/statics/uploads/2023/08/Final-Report-APFS-ADB-4164-2022.pdf

22 www.adb.org/sites/default/files/publication/731026/adb-green-blue-bond-framework.pdf

23 web.pln.co.id/statics/uploads/2022/12/PLN-Green-Finance-Framework.pdf

24 www.miga.org/project/pt-perusahaan-listrik-negara-persero-0

25 ieefa.org/resources/ieefa-who-benefits-migas-sustainable-loan-guarantee-pln

Polusi tidak terelakkan di Provinsi Banten yang penduduknya menderita masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kanker.





Penduduk setempat tinggal dan bermain di bawah bayang-bayang cerobong asap Suralaya.

Hidup bersama batubara

Setiap pembangkit listrik tenaga batubara baru yang dibangun di Indonesia kemungkinan besar akan beroperasi selama 40 tahun. Dengan mendukung rencana pengembangan batubara PLN, ADB membantu membelenggu Indonesia—negara yang sangat penting dalam upaya mengatasi krisis iklim global—ke dalam masa depan yang akan sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang paling kotor. Konsekuensi dari keputusan ini bersifat global dan akan menyulitkan Indonesia dalam mencapai target emisi Perjanjian Paris.

Namun demikian, dampaknya akan sangat lebih dirasakan oleh masyarakat di Jawa bagian barat, yang setiap hari hidup dengan polusi yang dimuntahkan PLTU Suralaya dan industri berat—kilang petrokimia, pabrik baja, dan pabrik plastik—yang sebagiannya ditenagai PLTU tersebut.

Rasa takut yang dipicu oleh intimidasi dari industri dan pemerintah membuat penduduk setempat untuk pasrah terhadap ekspansi PLTU Jawa 9 & 10. “Batubara dan industri berat sudah beroperasi di sini sekian lama sehingga masyarakat pun sudah pasrah. Tidak terhitung banyaknya—Anda bisa melihatnya ada di mana-mana. Menurut masyarakat, apa gunanya kita melawan?” kata Mad.

Namun demikian, terlepas dari berbagai hambatan tersebut, beberapa pihak telah melakukan perlawanan di pengadilan²⁶, dengan meluncurkan protes, dan dalam kampanye-kampanye yang menargetkan para penyandang dana²⁷ lain bagi PLTU Jawa 9 & 10 agar menghentikan pembangunannya—atau setidaknya membuatnya mematuhi peraturan lingkungan.

Sutrisno (26) adalah anak yang tumbuh berkat pesatnya perkembangan batubara di daerah tersebut. Ia lahir di bawah bayang-bayang PLTU Suralaya di akhir tahun 1990-an, tepat setelah ekspansi besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas PLTU tersebut sebesar 1.800 megawatt. ADB dan Bank Dunia merupakan salah satu penyandang dana²⁸ pada tahapan ini. (Sutrisno adalah nama samaran untuk melindunginya dari ancaman pemerintah dan industri).

Pada saat ia masih remaja, lebih dari 1.600 perusahaan industri dan manufaktur beroperasi di provinsi ini karena terdorong oleh mudahnya akses ke listrik bertenaga batubara. Ratusan perusahaan tersebut memiliki masalah²⁹ serius dalam pengelolaan polusi, termasuk kebocoran bahan kimia berbahaya dan praktik pembuangan limbah yang buruk. Asosiasi Pengelola Limbah Indonesia menyebut situasi ini sebagai keadaan darurat polusi.

26 trendsia.org/en/threatening-environment-and-public-health-walhi-sues-java-9-10-environmental-permit/

27 www.banktrack.org/project/java_9_10

28 documents1.worldbank.org/curated/en/343731628595913833/pdf/Announcement-of-Indonesia-Suralaya-Thermal-Power-Project-on-July-2-1992.pdf

29 trendsia.org/wp-content/uploads/2020/09/FA-LAPORAN-PLTU-JAWA-9-10-ENG.pdf

Seperti kebanyakan orang di daerah tersebut, Sutrisno tidak menyadari bahwa polusi yang terjadi bukanlah hal yang lumrah karena hanya sebatas itulah yang ia ketahui. Selain itu, anggota keluarganya bekerja di PLTU Suralaya, dan ia tinggal di perumahan yang dibangun untuk para karyawan. Masa kecilnya lekat dengan batubara dan ia menjalaninya sebagai realitas hidup— bahkan pada saat kabut asap memenuhi paru-parunya atau lapisan abu menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya.

Namun itu semua berubah ketika Sutrisno merantau untuk kuliah di provinsi lain dan bertemu dengan para aktivis lingkungan yang mempertanyakan ketergantungan Indonesia pada batubara. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana batubara merugikan negara. “Ini membuka mata saya tentang apa yang terjadi di kampung halaman saya,” ujarnya.

Setelah lulus, ia kembali ke Provinsi Banten dan menikah. Ia mulai menyadari bagaimana batubara mengganggu kehidupannya. Ia mencoba bertani, tetapi sulit ia lakukan karena adanya polusi. Kompleks perumahan karyawan tempat ia dibesarkan juga dihancurkan untuk membuka jalan bagi ekspansi PLTU Jawa 9 & 10 dengan peringatan yang minim bagi anggota keluarganya maupun penduduk lainnya. Selain itu, kompensasi yang diberikan tidak memadai bagi mereka untuk dapat terus tinggal di daerah tersebut. Ia pun mulai melihat bahwa para penduduk lainnya juga menderita.

“Saya memutuskan untuk mulai angkat suara. Saya tak ingin tinggal diam lagi,” ujarnya.

Namun demikian, buka suara juga berisiko. Dengan membuka suara, ia khawatir akan mengucilkan anggota keluarga yang pekerjaannya bergantung pada batubara. Atau lebih buruk lagi, menempatkan

mereka—dan dirinya sendiri—dalam risiko. Para warga bercerita bahwa ada preman-preman yang mengancam orang-orang yang angkat suara soal polusi, atau unit militer dan polisi khusus yang mendatangi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengintimidasi para penentang batubara. Ini pun sudah menimbulkan ketakutan tersendiri.

“Saya terkadang khawatir,” kata Sutrisno. Namun kepeduliannya yang mendalam terhadap masyarakatnya memberinya kekuatan untuk angkat suara. “Ini membuat saya berani bersuara terlebih bagi orang-orang yang terkena dampak batubara lebih buruk dibandingkan saya,” ujarnya.

Ini termasuk orang-orang seperti Mulyadi, seorang nelayan yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di perairan dekat PLTU Suralaya. Menurutnyanya, pada tahun 1980an, sebelum ekspansi besar pertama PLTU Suralaya, ada lebih dari 200 keluarga nelayan di daerah tersebut. Karena ikan begitu melimpah, sebagian besar keluarga tidak memerlukan perahu dan dapat mencari nafkah hanya dengan menebarkan jala dari pantai. (Mulyadi adalah nama samaran untuk melindunginya dari ancaman pemerintah dan industri).



Polusi dari pembangkit listrik tenaga batubara menyebabkan sulitnya bertani di daerah tersebut.



Semua yang ada di Provinsi Banten tampak tercemar jejak-jejak industri batubara.



Seiring dengan ekspansi pembangkit listrik tenaga batubara, semakin sulit untuk menemukan ikan di dekat pantai.

Namun, seiring dengan semakin besarnya kompleks batubara tersebut, semakin sulit untuk menemukan ikan di dekat pantai karena lokasinya yang berdekatan dengan PLTU. Para nelayan pun mulai membutuhkan perahu – dan bahan bakar yang mahal – untuk melaut ke perairan yang lebih dalam. Menurut Mulyadi, saat ini diperkirakan hanya ada kurang dari 100 keluarga yang masih melaut, dan sebagian besar tidak dapat mengandalkan mata pencaharian ini semata untuk menghidupi keluarga mereka.

Hampir setiap hari Mulyadi hanya bisa balik modal. Hanya sekali atau dua kali dalam sebulan ia akan mendapatkan hasil tangkapan yang cukup hingga dapat memberinya laba, tetapi itu pun tidak lagi cukup untuk menghidupi keluarganya dalam jangka panjang, meskipun sudah dibantu sawah kecil milik istrinya. “Kadang-kadang kami tidak makan selama satu atau dua hari,” katanya.

Penurunan pendapatan ini terjadi di saat yang tidak tepat. Dua tahun yang lalu, Mulyadi dan istrinya dikaruniai seorang anak perempuan pertama mereka. Tak lama setelah putrinya lahir, ia menderita batuk kronis dan kesulitan bernapas.

Tumbuh besar di daerah batubara di Banten sangat berbahaya bagi anak-anak seperti putrinya. Data yang dikumpulkan pada tahun 2017 oleh dinas kesehatan kota setempat menemukan bahwa hingga 15.000 balita di daerah tersebut menderita³⁰ Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Selain itu, emisi batubara diketahui juga berkaitan dengan kanker



Menangkap ikan tak lagi memberikan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga di daerah ini.

paru-paru, penyakit jantung, dan stroke, menurut³¹ Dinas Energi dan Mineral Provinsi Banten.

Mulyadi dan istrinya membawa anak perempuan mereka ke rumah sakit di Jakarta, dan anak mereka pun didiagnosis menderita ISPA. Kondisinya kian memburuk, dan menurunnya pendapatan keluarga membuat mereka kesulitan merawatnya.

“Saya mencoba mensyukuri apa yang saya miliki, tapi kami benar-benar kesulitan,” kata Mulyadi. Dia tidak percaya bahwa para pengembang PLTU Jawa 9 & 10 dapat bertindak secara bertanggung jawab karena mereka pun telah lama mengabaikan hal-hal yang diinginkan masyarakat setempat.

“Pada titik ini, kita harus realistis. Sudah terlambat untuk menghentikan pembangunan industri di sini,” ujarnya. “Saya cuma berharap kita bisa menemukan keseimbangan yang lebih baik antara masyarakat dan industri.”

30 trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FA-LAPORAN-PLTU-JAWA-9-10-ENG.pdf

31 trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FA-LAPORAN-PLTU-JAWA-9-10-ENG.pdf

Nelayan kini harus melaut ke perairan yang lebih dalam untuk memperoleh ikan, yang membutuhkan perahu dan bahan bakar mahal.





Produk sampingan aktivitas industri tenaga batubara menggunung di seantero Provinsi Banten.

“Energi bersih saja tidak cukup”

Tidak banyak wilayah yang membutuhkan penyeimbangan ulang antara masyarakat dan industri lebih banyak daripada Provinsi Banten. Di sini segalanya tampak tercemar jejak-jejak industri batubara, mulai dari perairan lepas pantai provinsi yang membawa tongkang penuh batubara yang terbakar³² atau tumpah ke laut, garis pantai tempat pembangkit listrik tenaga batubara dibangun di pesisir dan menghasilkan listrik serta awan kabut asap, hingga kota terbesar provinsi ini, Cilegon, tempat berbagai kilang minyak dan pabrik bertenaga batubara menghasilkan produk sekaligus polusinya.

Sisa-sisa aktivitas industri tenaga batubara tidak pernah enyah dari daerah ini. Justru sebaliknya, mereka ditampung di tempat-tempat pembuangan sampah yang tersebar di seantero Banten. Di tempat-tempat inilah abu batubara dan produk-produk sampingan lain dari industri ini ditumpuk menjadi gunung limbah setinggi beberapa lantai yang dibiarkan di udara terbuka, banyak di antaranya membara sarat bahaya. Selain itu, lokasi limbah ini kebanyakan berada di daerah berpenduduk, dekat dengan rumah dan usaha kecil.

Sebagai pendukung kompleks Suralaya di masa lalu hingga sekarang, ADB memikul sebagian tanggung jawab atas keadaan di sini. Akan tetapi, pembiayaan hijau semata tidak akan mengubah distopia industri tenaga batubara yang setiap hari dijalani oleh penduduk Banten.

Bank tersebut sebenarnya memiliki mekanisme untuk memperbaiki keadaan yang ada. Program Mekanisme Transisi Energi³³ dari bank ini dan program Kemitraan Transisi Energi yang Adil³⁴ yang merupakan himpunan dana donor lebih besar yang dikoordinasikan oleh bank ini dapat digunakan untuk secara bertahap menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara yang ada. Pada Desember 2023, bank ini mengumumkan³⁵ penutupan dini pembangkit listrik pertama dari program Mekanisme Transisi Energi, yakni proyek Cirebon-1.

Andri Prasetyo, seorang peneliti di organisasi advokasi iklim Senik Centre Asia, mengatakan bahwa beberapa unit tua di kompleks Suralaya seharusnya termasuk dalam daftar penutupan dini, mengingat peran bank ini dalam pembiayaan tahap awalnya. “ADB membantu menciptakan kekacauan ini, jadi mereka memiliki tanggung jawab lebih besar untuk secara proaktif menggerakkan sumber daya guna membantu memperbaikinya,” ujarnya.

32 trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FA-LAPORAN-PLTU-JAWA-9-10-ENG.pdf

33 www.adb.org/projects/56140-001/main#project-pds

34 www.adb.org/projects/57050-001/main

35 www.adb.org/news/new-agreement-aims-retire-indonesia-660-mw-coal-plant-almost-7-years-early#:~:text=Since%20Cirebon%2D1%20was%20commissioned,significant%20carbon%20dioxide%20emission%20reductions



Pembangunan PLTU Jawa 9 & 10 saat ini akan membuat generasi baru terpapar dampak-dampak polusi batubara.

Namun demikian, meskipun akan sedikit melegakan, penutupan dini unit-unit tua ini tidak akan memperbaiki masalah ekspansi PLTU Jawa 9 & 10 yang sedang dibangun. Jika mulai beroperasi sesuai jadwal pada tahun 2025, proyek ini kemungkinan akan beroperasi hingga tahun 2055, yang menambah karbon dioksida selama 30 tahun ke atmosfer dan membuat seluruh generasi anak-anak terpapar masalah pernapasan dan kesehatan lainnya.

Beberapa warga setempat, yang mengatakan bahwa masyarakat tidak pernah benar-benar diajak berembuk tentang ekspansi tersebut, mengajukan pengaduan³⁶ resmi terhadap lembaga keuangan pembangunan lainnya, yaitu IFC dari Grup Bank

Dunia, yang secara tidak langsung mendukung proyek tersebut. Pengaduan yang dilayangkan kepada badan pengawas internal IFC, yakni Compliance Advisor Ombudsman, menuduh bahwa pembiayaan tidak langsung ini melanggar pedoman sosial dan lingkungan lembaga tersebut.

Pihak pengaju pengaduan ini menuntut agar PLTU Jawa 9 & 10 dibatalkan atau dihentikan lebih awal secara bertahap mengingat dampaknya yang menghancurkan—dan karena Jawa 9 & 10 sebenarnya tidak perlu ada, mengingat surplus³⁷ listrik³⁸ di jaringan listrik setempat. Selain itu, para pengaju pengaduan ini menyerukan agar proyek tersebut diharuskan untuk mematuhi standar internasional.

36 www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2023/09/Java-9-and-10_CAO-complaint.pdf

37 trendasia.org/en/java-9-10/

38 news.mongabay.com/2021/02/in-indonesia-a-village-held-hostage-by-coal-pleads-for-change/

Pengaduan terhadap IFC

Pada bulan September 2023, beberapa penduduk Jawa bagian barat mengajukan pengaduan³⁹ ke mekanisme pertanggungjawaban IFC, yakni Compliance Advisor Ombudsman. Pengaduan ini mengindikasikan bahwa IFC telah melanggar pedoman sosial dan lingkungannya ketika salah satu nasabahnya, PT Hana Bank Indonesia, bergabung dengan pinjaman proyek sindikasi senilai 2,6 miliar dolar AS untuk mendanai PLTU Jawa 9 & 10.

IFC memiliki saham di Hana Bank Indonesia yang dikenal sebagai salah satu nasabah pertama Ekuitas Hijau IFC. Pada tahun 2020, IFC meluncurkan⁴⁰ Pendekatan Ekuitas Hijau yang dirancang untuk mengurangi keterpaparan anggota Grup Bank Dunia terhadap batubara melalui investasinya di bank-bank komersial. Nasabah Ekuitas Hijau berkomitmen untuk mengurangi pendanaan mereka terhadap batubara seiring waktu. Namun, setelah adanya pendanaan Hana Bank Indonesia untuk PLTU Jawa 9 & 10 beserta kemarahan yang ditimbulkannya, nasabah Ekuitas Hijau sekarang harus berkomitmen untuk sama sekali tidak mendanai batubara terhitung sejak diberikannya investasi IFC.

Beberapa penduduk Jawa, yang identitasnya tetap dirahasiakan demi keamanan, mengajukan pengaduan tersebut bersama PENA Masyarakat dan Trend Asia, dengan dukungan dari Inclusive Development International dan Recourse. Pengaduan tersebut dinyatakan layak⁴¹ oleh badan pengawas internal IFC, Compliance Advisor Ombudsman, yang sedang melakukan penilaian⁴² untuk menentukan perlu tidaknya penyelidikan kepatuhan penuh.

Meskipun tidak menjadi subjek pengaduan, ADB memiliki pengaruh substansial untuk mendorong agar tuntutan-tuntutan tersebut dipenuhi. Nasabah bank, PLN, memiliki 51% saham di PLTU Jawa 9 & 10 dan merupakan satu-satunya pembeli listriknya. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi penyandang dananya, yaitu ADB, tidak hanya terhadap Jawa 9 & 10 tetapi juga terhadap kapasitas batubara sebesar 13,8 gigawatt dalam rencana bisnis utilitas tersebut. Pengaruh bank ini terhadap PLN akan terus melonjak seiring dengan aliran miliaran dolar investasi “hijau” ke Indonesia.

“Investasi-investasi ini berisiko mengalami kerugian—atau secara efektif dikandaskan—oleh dukungan terus-menerus ADB terhadap batubara,” ujar Mad, seorang aktivis lingkungan. “Bank ini tidak bisa mengklaim membantu Indonesia jika investasi mereka justru menghancurkan lingkungan,” katanya.

Bagi Sutrisno, seorang lulusan universitas yang pulang kampung ke Provinsi Banten, pilihan bagi ADB sudah jelas. “Menurut saya, apa yang seharusnya terjadi? Saya ingin semua pembangkit listrik tenaga batubara ditutup. Saya ingin suatu model pembangunan yang lebih demokratis, dengan lebih sedikit industri, dan lebih banyak alam,” ujarnya. “Energi bersih saja tidak cukup.”

39 www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2023/09/Java-9-and-10_CAO-complaint.pdf

40 www.ifc.org/en/insights-reports/2023/greening-equity-investments-in-financial-institutions

41 www.cao-ombudsman.org/cases/indonesia-keb-hana-indonesia-rights-issue-iv-01suralaya-village

42 www.cao-ombudsman.org/cases/indonesia-keb-hana-indonesia-rights-issue-iv-01suralaya-village



**Inclusive
Development
International**

Inclusive Development International
9 SW Pack Square, Suite 301
Asheville, NC 28801 USA